

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini membahas mengenai gelombang imigran yang melanda Eropa khususnya wilayah sekitar Laut Mediterania beserta kebijakan Uni Eropa dalam menangani hal tersebut yang terwujud dalam pembentukan Operasi Triton, yang menggantikan operasi sejenis oleh Italia yaitu Operasi Mare Nostrum.

Penyelesaian masalah imigran telah menjadi tantangan tersendiri bagi Uni Eropa di abad 21 ini. Selama beberapa tahun terakhir, Eropa tengah dilanda permasalahan yang diakibatkan oleh peningkatan drastis jumlah imigran yang berupaya memasuki wilayahnya. Hal ini menjadi perhatian masyarakat internasional dan dikenal dengan fenomena “*Europe migrant crisis*”. Dilema yang dialami Uni Eropa ini terkait dengan krisis kemanusiaan, stabilitas regional, dan opini publik internasional. Di satu sisi Eropa berkewajiban untuk membantu dan membuka diri terhadap para imigran yang berstatus sebagai pengungsi ataupun pencari suaka, sementara di sisi lain jumlah pendatang yang melebihi kapasitas tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Eropa menjadi tujuan utama dari para imigran didasarkan pada faktor ekonomi mengingat Eropa merupakan benua dengan tingkat *Gross Domestic Product* (GDP) tertinggi di dunia.<sup>1</sup> Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa para imigran yang datang ke

---

<sup>1</sup>International Monetary Fund. *IMF Data Mapper*. Diakses dari [http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=WEO&indicator=NGDP\\_RPCH&year=2016&geoitems=EURO](http://www.imf.org/external/datamapper/index.php?db=WEO&indicator=NGDP_RPCH&year=2016&geoitems=EURO) pada 25 Agustus 2015.

Eropa memandang Eropa sebagai suatu tempat perlindungan untuk memulai hidup baru yang lebih baik.

Laut Mediterania, yang terletak di antara benua Afrika dan benua Eropa, disebut sebagai jalur terpadat sekaligus jalur paling mematikan yang dilalui oleh para imigran untuk menuju ke Eropa. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) menyebutkan bahwa jumlah imigran dengan kedatangan laut di Eropa melalui Laut Mediterania pada tahun 2013 adalah sejumlah 60.000 jiwa, jumlah ini meningkat menjadi 219.000 pada tahun 2014, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2015<sup>2</sup>.

Tingginya tingkat kedatangan imigran diikuti dengan tingkat kematian yang tinggi pula. Pada tahun 2014 sejumlah 3072 imigran dinyatakan mengalami kematian di laut, jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah 700 jiwa kematian<sup>3</sup>. Hal ini dikarenakan para imigran tidak dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dalam menempuh perjalanan laut. Mayoritas imigran pergi dengan keadaan memprihatinkan dan tidak sedikit yang melalui jalur ilegal dengan membayar pada pelaku penyelundupan manusia. Tindakan-tindakan seperti ini tentunya sangat membahayakan jiwa para imigran mengingat keselamatan dan kenyamanan bukanlah fokus utama dari para kriminal.

Faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah imigran yang melalui Laut Mediterania diantaranya adalah merebaknya globalisasi yang memudahkan

---

<sup>2</sup>UNHCR. *The Sea Route to Europe: The Mediterranean Passage in the Age of Refugees*. Diakses dari <http://www.unhcr.org/5592bd059.pdf> pada 30 September 2015.

<sup>3</sup>International Organization for Migration (IOM). 2014. *Fatal Journeys; Tracking Lives Lost during Migration*. Diakses dari <http://publications.iom.int/book/FatalJourneysCountingtheUncounted.pdf> pada 20 Agustus 2015.

perjalanan lintas batas negara. UNHCR *Global Trends Report* mencatat pada tahun 2013 sejumlah 51,2 juta orang terpaksa bermigrasi di seluruh dunia. Jumlah ini meningkat 6 juta dibanding tahun sebelumnya yaitu sejumlah 45,2 juta jiwa pada tahun 2012<sup>4</sup>. Jumlah ini merupakan jumlah tertinggi di era paska Perang Dunia II. Kemudian letak geografis Laut Mediterania yang memiliki jarak terdekat yang menghubungkan Benua Eropa dan Benua Afrika dinilai memudahkan para imigran.

Untuk mengatasi krisis ini, Uni Eropa melancarkan sebuah operasi di Laut Mediterania yang disebut Operasi Triton. Permasalahan gelombang imigran masuk dalam topik “*justice and home affairs*” dalam Uni Eropa. Uni Eropa telah membentuk sejumlah lembaga untuk melaksanakan tugas tertentu baik secara hukum, teknis, atau ilmiah dalam lingkup Uni Eropa. Lembaga-lembaga ini bersifat independen dan masing-masing memiliki dasar hukum yang legal. Untuk menangani masalah-masalah terkait kontrol perbatasan Uni Eropa dan kerja sama negara-negara anggota atas permasalahan tersebut dibentuklah *European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union* (Frontex) yang bermarkas di Warsawa, Polandia.

Aktivitas Frontex dimulai setelah terbitnya *Council Regulation* (EC) No. 2007/2004 pada 26 Oktober 2004 yang menetapkan *an European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union*, dimana peraturan ini merupakan dasar dari keberadaan dan segala aktivitas Frontex. Penghapusan sistem pengecekan dan

---

<sup>4</sup>UNHCR. *Global Trends Press Release*. Diakses dari <http://unhcr.org/556725e69.pdf> pada 30 September 2015.

kontrol perbatasan internal di bawah ketentuan Schengen meningkatkan pentingnya kontrol perbatasan eksternal Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa mengandalkan kontrol dan pengawasan perbatasannya pada lembaga di tingkat Uni Eropa. Frontex dibentuk untuk membantu negara-negara anggota dalam pengelolaan kontrol perbatasan eksternal mereka demi terciptanya konsistensi dan harmonisasi dalam kontrol perbatasan Uni Eropa. Secara keseluruhan operasi Frontex ditujukan untuk mendeteksi dan mengatasi permasalahan migrasi ilegal, perdagangan manusia, dan infiltrasi teroris. Frontex tidak memiliki penjaga perbatasan sendiri dan hanya dapat menyediakan bantuan bagi negara-negara anggota yang memintanya sementara negara-negara anggota tetap bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan bagian di dalamnya. Frontex mengkoordinasikan operasi gabungan dengan tujuan pemeriksaan dan pengawasan perbatasan eksternal dari negara-negara Uni Eropa. Tujuan dari operasi ini misalnya termasuk dukungan dari negara anggota dalam menghadapi tekanan tertentu sebagai bentuk solidaritas Eropa, serta untuk mengumpulkan informasi mengenai modus operandi imigran dan sebagai fasilitator dari praktek bersama negara-negara anggota.

Frontex membentuk Operasi Triton yang mulai beroperasi pada 1 November 2014 untuk mengimplementasikan aktivitas operasional yang terkoordinasi di perbatasan laut eksternal wilayah Laut Mediterania Tengah guna mengontrol migrasi tak teratur yang menuju ke wilayah teritori negara-negara anggota Uni Eropa dan untuk mengatasi kejahatan lintas batas yang mengancam Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa yang menghadapi tekanan migrasi secara signifikan dapat meminta bantuan teknis dan operasional dari Frontex.

Frontex kemudian dapat meluncurkan sebuah operasi gabungan berdasarkan permintaan dari negara anggota, seperti dalam kasus ini dengan Operasi Triton. Sebuah operasi gabungan dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya dari negara anggota. Dalam kasus Triton, 21 negara anggota Schengen serta lembaga dan badan Uni Eropa lainnya berpartisipasi dalam operasi tersebut.

Regulation (EU) No. 656/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 “*establishing rules for the surveillance of the external sea borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union*” menjadi dasar yang legal dari keberadaan Operasi Triton sebagai operasi gabungan negara-negara anggota Uni Eropa dalam membantu Italia mengatasi permasalahan imigran di Laut Mediterania. Statement dari Komisioner Uni Eropa, Cecilia Malmström-pun turut mendukung hal ini, “*Italy and the EU Agency Frontex are making good progress in preparing the joint operation Triton, coordinated by Frontex. The main elements have now been agreed and Frontex has sent out a call for participation to EU Member States. So many desperate people are trying to cross the Mediterranean, fleeing conflict and war. The EU and its Member States need to respond and take action to save lives.*”<sup>5</sup>

Operasi Triton yang merupakan operasi pengamanan perbatasan Uni Eropa memiliki anggaran operasi sebesar 2,9 juta euro per bulan. Operasi Triton pada awalnya dijadwalkan berakhir pada bulan Januari 2015, namun melihat fakta

---

<sup>5</sup> European Commission; Press Release Database. *Statement by EU Commissioner Cecilia Malmström on operation Triton*. Diakses dari [http://europa.eu/rapid/press-release\\_STATEMENT-14-302\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-302_en.htm) pada 23 November 2015.

bahwa kontribusinya masih diperlukan maka keberadaan Operasi Triton diperpanjang hingga akhir tahun 2015 dan menunggu keputusan lebih lanjut.

Operasi Triton merupakan hasil kelanjutan dari Operasi Mare Nostrum yang sebelumnya dijalankan oleh Italia. Pada tahun 2013, jumlah imigran yang melintasi Laut Mediterania menuju Eropa tercatat sejumlah 60.000 jiwa. Kemudian pada tahun yang sama, kedatangan ilegal dari laut di Italia tercatat sejumlah 42.925 jiwa<sup>6</sup>. Italia berada pada urutan pertama negara di benua Eropa dengan jumlah kedatangan laut terbanyak dimana pada quarter pertama 2014 jumlah kedatangan imigran meningkat sejumlah 823% dari periode yang sama pada tahun 2013<sup>7</sup>. Letak geografis Italia, dengan krisis yang terjadi di sekitar wilayahnya, membuatnya lebih rentan terhadap dampak dari gelombang imigran dibanding negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Hal ini karena pada rentang waktu tersebut sedang terjadi krisis di Libya yang merupakan negara Afrika dengan letak terdekat dengan Italia.

Operasi Mare Nostrum merupakan operasi yang dibentuk oleh Pemerintah Italia pada 18 Oktober 2013. Operasi Mare Nostrum diharapkan dapat menyelamatkan jiwa di Laut Mediterania sekaligus dapat mengurangi arus imigrasi ilegal menuju ke Eropa. Cakupan wilayah Operasi Mare Nostrum meliputi wilayah Selat Sisilia seluas 70.000 km<sup>2</sup> atau tiga kali luas wilayah Sisilia. Rute Operasi Mare Nostrum memungkinkannya untuk melakukan aktivitas pengamanan dan penyelamatan melalui perairan internasional, bahkan hingga mencapai wilayah Libya. Operasi Mare Nostrum dibentuk terutama untuk mengatasi keadaan darurat kemanusiaan di Laut Mediterania dan di Selat Sisilia.

---

<sup>6</sup>UNHCR. *Asylum and Migration Key Facts & Figures*. Diakses dari <http://www.unhcr.org/pages/4a1d406060.html> pada 20 September 2015.

<sup>7</sup>National Geographics. op. cit.

Operasi Mare Nostrum dapat melakukan intervensi untuk menghentikan berbagai aktivitas kriminal, termasuk perdagangan manusia, sesuai dengan peraturan penegakan hukum di laut lepas. Operasi Mare Nostrum yang dijalankan dengan alokasi dana 9 juta euro per bulan<sup>8</sup> dianggap kontroversial. Operasi Mare Nostrum diakhiri oleh pemerintah Italia pada 31 Oktober 2014 hingga kemudian digantikan oleh Operasi Triton.

Operasi Mare Nostrum dilancarkan Pemerintah Italia setelah Lampedusa, salah satu wilayahnya menyatakan kewalahan atas gelombang imigran yang terjadi. Lampedusa, sebuah pulau terluar Italia, mengalami dampak terparah akibat gelombang imigran. Lampedusa merupakan pulau kecil seluas 20,2 km<sup>2</sup> dengan total populasi sejumlah 6000 jiwa<sup>9</sup>. Lampedusa termasuk dalam Kepulauan Pelagian dan merupakan bagian dari Provinsi Sisilia dengan letak lebih dekat ke Afrika daripada ke Italia. Selama 20 tahun terakhir, Lampedusa telah menjadi tujuan utama dari para imigran asal Afrika yang meninggalkan negara asalnya karena berbagai alasan. Libya yang sedang dilanda konflik domestik dimanfaatkan oleh para imigran yang ingin meninggalkan negaranya sebagai titik keberangkatan, dan Lampedusa yang merupakan pulau terluar wilayah Italia dimanfaatkan sebagai tujuannya. Jarak antara Libya dan Lampedusa yang dapat ditempuh selama kurang lebih satu hari melalui rute Laut Mediterania Tengah memudahkan dan mendorong para imigran untuk mengambil rute ini. Imigran yang melarikan diri dari berbagai konflik di negaranya terus membanjiri Laut Mediterania dalam upaya menciptakan kehidupan yang lebih baik. Berbagai hal

---

<sup>8</sup>National Geographics. *Amid Record Waves of Refugees, Italy Finding Limits to Its Compassion*. Diakses dari <http://news.nationalgeographic.com/news/special-features/2014/10/141031-italy-immigration-crisis-human-trafficking/> pada 20 September 2015.

<sup>9</sup>Ibid.

melatarbelakangi peningkatan jumlah imigran ini seperti fenomena kemiskinan, konflik domestik dan instabilitas yang berkepanjangan, serta berbagai penganiayaan dan diskriminasi yang dialami di negara asalnya.

Jumlah imigran yang mencapai Lampedusa sebanyak dua kali lipat dari populasi Lampedusa atau melebihi kapasitas pulau tersebut. Banyak dari imigran yang terabaikan di Lampedusa sembari menunggu aplikasi suakanya ditangani. Fasilitas yang disediakan pemerintah Lampedusa untuk pengungsi tidak mampu lagi menampung para pengungsi sehingga para imigran terpaksa berdiam di luar bangunan. Giusi Nicolini yang merupakan Walikota Lampedusa, dalam pidatonya di *Vatican Conference on Climate Change and Human Slavery 2015*, "*urged Europe to open its eyes to the boats of death that sail from Northern Africa to Lampedusa*"<sup>10</sup>. Hal ini terkait ketidakmampuan Pemerintah Lampedusa dalam menangani gelombang imigran yang terus berdatangan ke wilayahnya dalam jumlah yang masif. Pusat penerimaan imigran telah mengalami kelebihan populasi. Jumlah imigran yang berdatangan setiap hari terus meningkat, sementara bangunan hanya mampu menampung hingga 300 orang setelah mengalami kebakaran beberapa tahun yang lalu. Dilema juga dialami masyarakat Lampedusa yang melihat langsung banyaknya imigran yang memasuki pulauanya setiap harinya, rasa kemanusiaan mendorong mereka untuk menolong para imigran tersebut namun mereka juga menyadari bahwa keberadaan imigran yang di luar batas tersebut akan semakin memperburuk perekonomian negaranya.

Gelombang imigran yang terus terjadi mengekspos sistem migrasi dan suaka yang dimiliki Italia dan Uni Eropa serta mempertanyakan kapabilitas

---

<sup>10</sup>The Telegraph. *UK is not doing enough to help refugees coming to Europe*. Diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/11754254/UK-is-not-doing-enough-to-help-refugees-coming-to-Europe-says-Lampedusa-mayor.html> 18 Oktober 2015.



mereka dalam menangani gelombang imigran yang tengah terjadi. Penggantian Operasi Mare Nostrum dengan Operasi Triton juga memicu pertanyaan mengingat kedua operasi dijalankan oleh pihak yang berwenang serta masing-masing bersifat legal dan memiliki tujuan yang hampir sama.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Uni Eropa membentuk Operasi Triton di Laut Mediterania?

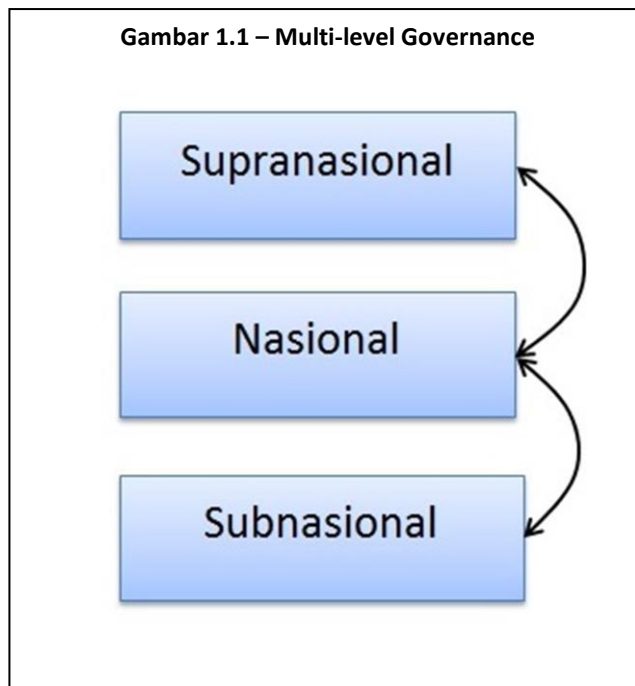
## **C. Kerangka Pemikiran**

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, penulis akan melakukan analisis menggunakan teori Multi-level Governance (MLG). Teori ini pertama dikembangkan oleh Liesbet Hooghe dan Gary Marks pada tahun 1993. Teori ini berakar dari pengembangan terhadap studi atas integrasi Eropa.

*“The point of departure for this multi-level governance is the existence of overlapping competencies among multiple levels of governments and the interaction of political actors across those levels. ...Instead of the two level game assumptions adopted by state centrists, MLG theorists posit a set of overarching, multi-level policy networks. ...The presumption of multi-level governance is that these actors participate in diverse policy networks and this may involve sub-national actors - interest groups and subnational governments - dealing directly with supranational actors”<sup>11</sup>.*

---

<sup>11</sup>Marks, Gary dkk. 1996. *Governance in the European Union*. London: SAGE Publications Ltd., Hal. 167



Secara umum, teori ini menggambarkan tentang adanya kewenangan pemerintahan yang terbagi dalam tiga tingkatan yaitu; subnasional, nasional, dan supranasional dimana pemerintahan dalam tiap tingkatan saling sinergis dan

berkoordinasi.

MLG menyebutkan bahwa perkembangan dalam hubungan internasional telah menyebabkan negara tidak lagi menjadi pemegang kekuasaan utama dalam pengambilan kebijakan. MLG menggambarkan “*system of continous negotiation among governments at several territorial tiers-supranational, national, regional, and local*”<sup>12</sup> yang merupakan kekhasan dari kebijakan struktural Uni Eropa. Perspektif MLG merupakan pengembangan terbaru dari upaya teoritis untuk memahami Uni Eropa. MLG menunjukkan bahwa telah terjadi mobilisasi politik dan transformasi struktural di Uni Eropa. MLG dalam Uni Eropa dipahami sebagai sebuah kompetensi untuk saling menghargai, menciptakan tanggung jawab bersama, dan kerja sama antara berbagai tingkatan pemerintahan yaitu Uni Eropa, negara anggota, dan otoritas lokal. Dalam konteks ini, hal ini merujuk pada prinsip *subsidiary* yang menempatkan hasil keputusan sedekat mungkin dengan

<sup>12</sup>Trnski, Marko. *Multi-level Governance in the EU*. Diakses dari <http://www.sustainableislands.eu/BlockImages/InLibraryData/GalleryData/MULTI-LEVEL%20GOVERNANCE%20IN%20THE%20EU%20by%20Marko%20Trnski.pdf> pada 20 September 2015.

masyarakat dan meyakinkan bahwa keputusan di level Uni Eropa memungkinkan untuk diterapkan di tingkat nasional, regional, dan lokal.

MLG berpendapat bahwa institusi Uni Eropa seperti Komisi Eropa dan Parlemen Eropa dapat menjadi aktor influensial dan independen dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa. Walaupun pemerintah supranasional tidak dapat mengambil alih kewenangan dan pilihan aktor subnasional dan nasional, namun Komisi Eropa dapat mendesak hal-hal yang menjadi perhatian agar menjadi pertimbangan aktor-aktor lain. Perspektif ini juga menunjukkan bahwa aktor subnasional semakin dipengaruhi oleh perkembangan di tingkat Uni Eropa dan sebagai hasilnya telah berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di tingkat Uni Eropa. Setiap aktor di berbagai tingkatan memiliki potensi-potensi penting seperti kepemilikan informasi, kekuatan politik, keahlian dan prestise, dimana semua hal tersebut terlibat dalam hubungan tawar-menawar. Pemerintah pusat tidak selalu mampu bertindak sebagai mediator antara Uni Eropa dan aktor subnasional. Perlu ditekankan bahwa perspektif MLG mengakui pentingnya peran pemerintah negara dalam pembuatan kebijakan Uni Eropa. Aktor subnasional dan aktor Eropa tidaklah mampu menggantikan pemerintahan negara sebagai pengambil keputusan otoritatif. Koordinasi antar aktor di berbagai tingkatan tersebut telah menciptakan suatu pola hubungan yang kompleks dan khas Uni Eropa. Aktor dalam tiap tingkatan masing-masing tetap memiliki peran dan wewenang, yang membedakan hanya persentase kompetensi yang dimiliki.

Upaya mendorong tata pemerintahan yang baik dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik di tingkat regional telah melahirkan pemikiran tentang MLG. Perumusan kebijakan publik tidak lagi menjadi monopoli satu

lembaga pemerintahan pusat melainkan melibatkan aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah di tingkat yang berbeda (regional, nasional, dan lokal) hingga kemudian terbentuk suatu “*policy network*” dalam kebijakan publik. Adanya MLG dan sistem tata kelola yang terdiri atas berbagai level membuat negara tidak hanya mematuhi peraturan yang dibuat di tingkat nasional, melainkan juga di tingkat supranasional. Dalam MLG, integrasi Eropa merupakan suatu proses politik dimana otoritas dan wewenang pembuatan kebijakan dibagikan melalui berbagai level pemerintahan; subnasional, nasional, dan supranasional. Dengan kata lain, negara membayar harga dari kemerdekaannya dan kompetensi nasionalnya demi mencapai pencapaian di bidang-bidang lain.

Dalam kasus penanganan masalah imigran di Laut Mediterania, gelombang imigran yang dirasakan oleh masyarakat Lampedusa memicu pemerintah Italia sebagai aktor nasional untuk mengambil tindakan yaitu dengan membentuk Operasi Mare Nostrum. Ketika kebijakan pemerintah Italia belum dapat mengatasi permasalahan imigran tersebut, dibentuklah Operasi Triton oleh Uni Eropa. Hal ini karena masalah yang ada dinilai sebagai ancaman potensial bagi Eropa secara keseluruhan. Pada saat inilah terdapat perpindahan wewenang, kasus yang semula menjadi permasalahan pemerintah subnasional yaitu wilayah Pulau Lampedusa kemudian ditangani oleh pemerintah Italia sebagai aktor nasional, ketika pemerintah Italia mulai kewalahan mengatasi masalah ini, Uni Eropa sebagai aktor supranasional mengajukan dirinya untuk berperan dalam masalah ini.

## **D. Hipotesis**

Dari rumusan masalah dan kerangka teori yang digunakan di atas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa:

1. Italia dengan Operasi Mare Nostrum belum mampu mengatasi gelombang imigran di Laut Mediterania yang menuju ke Eropa.
2. Permasalahan imigran merupakan kompetensi bersama antara Uni Eropa dengan negara-negara anggota.
3. Gelombang imigran yang terus berlangsung dinilai mengancam stabilitas Eropa sehingga Uni Eropa sebagai aktor supranasional mengambil alih dengan Operasi Triton.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Memahami gelombang imigran yang terjadi di Laut Mediterania.
2. Mengetahui alasan Uni Eropa membentuk Operasi Triton di Laut Mediterania yang menggantikan Operasi Mare Nostrum milik Italia.

## **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian diperlukan sebagai langkah untuk menghindari luasnya pembahasan atas objek yang diteliti. Hal ini dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik. Adapun jangkauan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dari tahun 2013 - 2015. Pada tahun 2013, Operasi

Mare Nostrum mulai dibentuk pemerintah Italia untuk mengatasi permasalahan imigran ilegal di Laut Mediterania. Penelitian ini diakhiri pada tahun 2015 yang merupakan waktu penulisan skripsi, dimana hingga pada tahun 2015 Operasi Triton oleh Uni Eropa masih berjalan. Mengingat hingga saat ini permasalahan masih terus berlangsung sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya fakta-fakta baru seiring dengan berjalannya penulisan skripsi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data yang diambil dari sumber tertulis berupa buku, literatur, jurnal, surat kabar, serta dengan memanfaatkan data-data dari situs internet berupa jurnal online, berita, dan artikel dari web yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berarti penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sumber data harus memiliki kelengkapan informasi (data dikumpulkan) dan juga validitas.

### **2. Teknik Analisis Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, lebih memfokuskan pada kualitas dengan analisis kualitatifnya sehingga didapat suatu hasil akhir yang benar dengan kesimpulan yang tepat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 6 bab, adapun sistematika penulisan dapat dirumuskan sebagai berikut:

**BAB I:** Akan dipaparkan tentang konstruksi skripsi secara keseluruhan meliputi;

alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Akan menjelaskan mengenai gelombang imigran yang terjadi di Laut Mediterania beserta respon Pemerintah Italia atas gelombang imigran yang melanda wilayahnya.

**BAB III:** Akan menjelaskan mengenai posisi/kebijakan Uni Eropa terkait penanganan permasalahan imigran di kawasan Eropa, serta pembentukan Operasi Triton di Laut Mediterania.

**BAB IV:** Akan menjelaskan mengenai alasan dan sebab Uni Eropa membentuk Operasi Triton di Laut Mediterania yang menggantikan Operasi Mare Niostrum oleh Pemerintah Italia

**BAB V:** Berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus menandai akhir dari penulisan karya tulis ini